

## **Signifikansi Keamanan Maritim Di ASEAN**

**Muhammad Ridho**

Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran  
(moh.ridho94@yahoo.com)

**Arfin Sudirman**

Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran  
(arfin.sudirman@unpad.ac.id)

### ***Abstract***

*In order to securitizing maritime issues in the Southeast Asian region, ASEAN plays a significant role as a regional organization through three aspects as an instrument, arena and independent actors. Each aspect shows the seriousness of ASEAN in facing traditional and non-traditional maritime security threats. ASEAN created several mechanisms to maintain maritime security in the Southeast Asian region. However, the implementation of regional maritime law enforcement policies is an obstacle for ASEAN, including the differing views of some ASEAN member countries in addressing traditional and non-traditional maritime security threats. Moreover, with the principle of non-intervention of ASEAN on member countries, conditions have increasingly complex in ASEAN's efforts to strategically empowering maritime security of the Southeast Asian region.*

**Keywords:** *Role, ASEAN, Regional Organization, Maritime Security*

### **Abstrak**

Dalam menghadapi isu keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, ASEAN memainkan peran sebagai organisasi regional melalui tiga aspek yakni sebagai instrumen, arena dan aktor independen. Dari masing-masing aspek menunjukkan keseriusan ASEAN dalam menghadapi ancaman keamanan maritim yang bersifat tradisional dan non tradisional. ASEAN menciptakan beberapa mekanisme untuk menjaga keamanan maritim di kawasan Asia tenggara. Namun, implementasi kebijakan penegakan hukum maritim regional merupakan hambatan ASEAN, termasuk terdapat perbedaan cara pandang beberapa negara anggota ASEAN dalam menyikapi ancaman keamanan maritim yang bersifat tradisional dan non tradisional. Terlebih dengan prinsip non intervensi ASEAN terhadap negara anggota menyebabkan kondisi semakin kompleks dalam upaya ASEAN memperkuat keamanan maritim kawasan Asia tenggara secara strategis.

**Kata kunci:** Peran, ASEAN, Organisasi Regional, Keamanan Maritim

## **Pendahuluan**

Perairan di kawasan Asia Tenggara mengandung nilai yang sangat penting bagi negara di dalam kawasan tersebut, hal itu mencakup bidang ekonomi, komunikasi dan transportasi laut serta pengaruh negara anggota ASEAN dalam keamanan maritim global. Kawasan maritim Asia Tenggara memiliki potensi konflik yang sangat tinggi sehingga memunculkan berbagai ancaman keamanan maritim tradisional dan non-tradisional. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya koordinasi di tingkat negara anggota ASEAN dan ASEAN *sectoral bodies* yang fokus pada isu keamanan maritim secara menyeluruh agar dapat menghindari ancaman keamanan maritim yang kian bermunculan di kawasan maritim Asia Tenggara.

Terdapat rangkaian kepentingan dalam perairan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentu saja yang menjadi alasan negara anggota ASEAN mengusung kerja sama keamanan kolektif di bidang maritim, walaupun dalam prakteknya belum terlaksana sepenuhnya. Akan tetapi upaya pembentukan forum dan beberapa mekanisme kerja ASEAN yang menitikberatkan isu keamanan maritim merupakan suatu upaya dalam pembentukan kerja sama keamanan kolektif di bidang maritim.

Laut merupakan media utama untuk

keberlangsungan kegiatan ekonomi seluruh negara anggota ASEAN. Tidak hanya diperuntukan bagi negara dengan bentuk kepulauan (*archipelago*) layaknya Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam tetapi juga untuk negara yang berjajaran di sepanjang semanjung Malaysia hingga kawasan Indochina seperti Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Selain sebagai media transportasi dan jalur perdagangan dunia, Laut juga memiliki nilai penting sebagai penyedia sumber daya ikan dan hasil laut serta sumber daya minyak dan gas bagi kebanyakan negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan tidak sedikit perusahaan besar dari Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan Tiongkok yang tertarik untuk berinvestasi di bidang minyak dan gas alam (migas) pada beberapa negara di kawasan tersebut.

Berbicara tentang perikanan yang mana merupakan salah satu sektor ekonomi istimewa bagi negara kepulauan di Asia Tenggara. Berdasarkan total ikan yang beredar di pasar internasional, sekitar 25% dari total tersebut merupakan hasil produksi perikanan laut sepuluh negara di Asia Tenggara. Bila diurutkan empat negara dengan hasil perikanan tertinggi ialah Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina (ASEAN, 2015).

Laut di kawasan Asia Tenggara

memiliki peran penting bagi jalur transportasi internasional. Hal menjadikan peranan laut di kawasan tersebut sangat signifikan dengan nilai perdangan sekitar 5,3 triliun US\$ (Brandon, 2015). Oleh karena itu, untuk menjamin keselamatan dan keamanan laut untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi internasional berbagai langkah strategis diambil dengan sesama negara anggota ASEAN serta dengan negara mitra.

Apabila ditinjau lebih lanjut mengenai kepentingan negara anggota ASEAN terhadap keamanan maritim regional berlandaskan berbagai aspek. Hal ini meliputi aspek ekonomi, politik, lingkungan hidup dan militer.

### **Isu Keamanan Maritim di Asia Tenggara**

Wilayah maritim merupakan aspek yang sangat penting bagi negara di kawasan Asia Tenggara untuk keberlangsungan kegiatan perekonomian negaranya, bahkan negara luar kawasan memandang jalur perairan Asia Tenggara sebagai jalur laut strategis. Kawasan Asia Tenggara terhubung dengan kawasan di luarnya melalui tiga jalur laut strategis, yakni melalui Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Malaka.

Fungsi wilayah maritim yang sangat strategis menimbulkan isu keamanan kawasan yang dapat mengganggu kepentingan setiap negara, hal itu disebut

sebagai keamanan maritim yang mana dampaknya menimbulkan dorongan untuk memperkuat pengamanan maritim. Dominasi wilayah perairan di kawasan Asia Tenggara menyebabkan isu keamanan maritim dan politik banyak terjadi dari pada isu keamanan lainnya.

Masalah keamanan maritim sangat sulit bila diselesaikan sendiri oleh satu negara, namun perlu diurus secara bersama dengan negara tetangga dalam satu kawasan, sebab ancaman keamanan maritime dapat merugikan beberapa negara baik di dalam atau di luar kawasan tersebut. Kemungkinan terjadi ancaman dari luar kawasan lebih besar seperti kejahatan terencana yang bersifat lintas negara dengan mengambil keuntungan dari kondisi dalam negeri yang sedang tidak stabil. Kegiatan pelanggaran kedaulatan maritim yang banyak terjadi seperti penangkapan ikan secara illegal, klaim negara lain atas kedaulatan wilayah, aksi terorisme, bajak laut, penyelundupan manusia dan narkoba.

Apabila membahas mengenai geopolitik Asia Tenggara akan sangat akrab dengan Indonesia, karena luas wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia meliputi sekitar dua pertiga wilayah maritim di Asia Tenggara. Menggunakan logika geopolitik, terbentuknya kesadaran ruang secara langsung atau tidak langsung terhubung dengan kesejahteraan dan kepentingan

keamanan bagi manusia (Jakarta Greater, 2014). Dalam konteks negara modern, klaim kedaulatan yang dilakukan oleh suatu negara dan dibatasi melalui batas negara dengan instrumen hukum menandakan kesadaran ruang untuk melindungi dan menjamin kedaulatan serta keamanan.

Interaksi antar negara di kawasan Asia Tenggara meliputi peran dan pengaruh power ekstra kawasan dapat mempengaruhi dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Banyak aktor yang terlibat bila geopolitik kawasan Asia Tenggara digambarkan, sebab setiap aktor mempunyai kepentingan masing-masing. Bahkan sering terjadi perselisihan geopolitik baik antar negara anggota ASEAN maupun antar kawasan yang mempunyai power ekstra untuk memainkan pengaruh dan perannya.

### **Ancaman Keamanan Maritim di Kawasan Asia Tenggara**

Berdasarkan jenis ancaman dalam keamanan maritime dapat diklarifikasi menjadi dua jenis yakni ancaman keamanan maritime yang bersifat tradisional dan non-tradisional. Ancaman keamanan maritim tradisional selalu erat dengan istilah agresi dan invasi militer dari satu negara ke negara lain yang kemungkinan terjadinya kecil di era sekarang. Karena pergeseran konsep keamanan menghasilkan revolusi konsep pertahanan, yang mana keamanan tradisional lebih condong pada instrumen

kekuatan militer telah banyak ditinggalkan oleh setiap negara di dunia. Meskipun bukan satu-satunya instrumen dalam kepentingan nasional, kekuatan militer masih dinilai vital untuk memperkuat suatu bangsa (Darmono, 2010). Akan tetapi PBB memiliki peranan yang dikatakan mampu mengantisipasi dalam upaya pemaksaan kehendak suatu negara kepada negara lain dengan cara pembatasan kekuatan militer.

Pada perkembangan konsep keamanan menyebabkan ragam jenis ancaman keamanan semakin meluas, begitupun pada bidang keamanan maritim. Ancaman keamanan maritim non tradisional adalah perpanjangan makna keamanan yg biasanya identik dengan militer, hari ini isu keamanan sudah mencakup pertahanan di luar militer seperti perkembangan teknologi, kekuatan ekonomi, politik dan intelegen (Darmono, 2010). Dampak dari perkembangan konsep keamanan pada ragam jenis ancaman kedaulatan dan berbagai macam jenis masalah baru bermunculan baik dari segi hukum sampai ekonomi.

Dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai Hukum laut (UNCLOS) pada tahun 2008 menetapkan tujuh macam ancaman maritim, yaitu: (1) aksi teroris terhadap pelayaran, instalasi di laut, dan kepentingan-kepentingan maritim lainnya ; (2) pembajakan dan perompakan bersenjata

terhadap kapal; (3) penangkapan ikan secara ilegal; (4) pencemaran lingkungan laut; (5) penyelundupan manusia lewat laut; (6) penyelundupan narkoba dan bahan psikotropika; (7) penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal.

### **Persepsi ASEAN Tentang Ancaman Keamanan Maritim**

Secara konseptual, keamanan maritim dapat dipahami melalui perpektif keamanan yang bersifat kontemporer atau tradisional. Dalam perpektif keamanan tradisional yang cenderung bersifat *state centric* serta mengedepankan pendekatan melalui militer, maka makna keamanan maritim lebih ke arah kendali suatu negara pada wilayah maritimnya. Selaras dengan penjelasan konsep *sea power* oleh Alfred Thayer Mahan yang memfokuskan peran Angkatan Laut sebagai garda terdepan dalam pengamanan kawasan laut serta jalur perdagangannya secara signifikan (Giok, 2015).

Keberadaan, kapasitas dan kapabilitas kekuatan angkatan laut menjadi hal yang utama untuk mencapai kepentingan nasional dalam perpektif keamanan tradisional. Akan tetapi dalam prakteknya tidak jarang hal tersebut memicu terjadinya *security dilemma*. Apabila satu negara dalam suatu kawasan meningkatkan kekuatan AL maka hal tersebut membawa dampak pada negara lain untuk melakukan

hal yang sama. Peningkatan situasi seperti itu akan menciptakan masa persaingan dalam skala besar. Walaupun tidak dominan namun sudut pandang keamanan tradisional masih banyak digunakan di era ini.

Adapun cara pandang keamanan kontemporer menganggap pendekatan menggunakan basis militer hanya akan mengurangi ruang spektrum keamanan maritim dan AL tidak cukup untuk menjaga keamanan maritim. Sejalan dengan hal itu Christian Bueger (2015) memaparkan semiotika konsep keamanan maritim yang menautkan isu keamanan maritim dengan empat hal, yaitu ketahanan manusia, ekonomi biru, kekuatan laut dan keselamatan laut. Dalam memahami konsep keamanan maritim maka keempat hal tersebut tidak dapat diartikan secara terpisah karena seluruhnya saling berhubungan untuk membangun konsep keamanan maritim. Bila ditinjau lebih lanjut keempat hal tersebut merupakan perwakilan dari sisi budaya, ekonomi, politis dan teknis yang mana perlu dikembangkan untuk mencapai kondisi keamanan maritim stabil dan aman. Oleh karena itu, bila hanya satu aspek yang diunggulkan maka dimensi keamanan yang terbentuk dalam keamanan maritim sangat rendah.

Hanya saja tidak dapat dipungkiri ada kecenderungan pendekatan militer yang diutamakan dalam beberapa isu keamanan

maritim contohnya penjagaan kedaulatan dan isu-isu sub-strategis (budaya, ekonomi dan lingkungan) yang mana di dalamnya terdapat kepentingan tinggi. Sudut pandang keamanan kontemporer menyebabkan perluasan cakupan isu dan bertambahnya aktor dalam menjaga keamanan maritim. Sehingga, kerja sama dalam mewujudkan keamanan maritim cenderung menjadi opsi utama karena isu dan aktor saling terhubung. Untuk mengontrol cara berinteraksi antarnegara maka perlu dibentuk kesepakatan dan norma bersama serta hukum tertulis sebagai rujukan.

Berbicara tentang kawasan Asia Tenggara dengan ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan tersebut maka usaha bersama negara anggota ASEAN sangat diperlukan untuk menangkis ancaman keamanan maritim dan agar konflik serta berbagai permasalahan potensial yang dipicu dengan kenyataan bahwa kawasan tersebut merupakan rute perdagangan internasional yang sangat vital dapat dihindari. Berdasarkan hal tersebut, ASEAN melaksanakan Deklarasi ASEAN *Concord II* (Bali *Concord II*) yang diadakan di Bali pada 7 Oktober 2003. Bali *Concord II* menegaskan bahwa forum regional yang khusus membahas tentang isu yang bersifat lintas batas seperti isu maritim digunakan sebagai pendekatan yang integral dan menyeluruh.

Perspektif keamanan tradisional dan keamanan kontemporer mencerminkan dua sisi konsep keamanan maritim yang dianut ASEAN. Dari sisi keamanan tradisional, ASEAN menjunjung tinggi asas kedaulatan dengan memasukan kawasan laut sebagai kesatuan wilayah resmi suatu negara. Sehingga pengamanan dan pengawasan maritim merupakan hak dan tanggung jawab setiap negara. Maka dapat disimpulkan kemungkinan ancaman keamanan maritim yang muncul ialah dari aktor yang memiliki legitimasi politik yang diakui (negara) misalnya seperti unjuk kemampuan AL dan sengketa wilayah. Pemahaman keamanan maritim seperti itu ditemukan pada beberapa dokumen di masa awal terbentuknya ASEAN. Seperti yang terdapat pada dokumen *Treaty of Amity and Cooperation* yang merupakan pengusung prinsip dasar dalam interaksi antarnegara ASEAN dan negara mitra pada poin “*Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity, and national identity of all nations.*” (ASEAN, 1976)

Sedangkan pada perspektif keamanan kontemporer menemukan hal baru dalam mengidentifikasi ancaman keamanan maritim pada satu titik akan menyebabkan gangguan yang menyebar. ASEAN memahami sifat lintas dari ancaman keamanan maritim melalui

perspektif keamanan kontemporer. Penerangan ASEAN tertuang pada dokumen ASEAN *Concord* di Bali, 7 Oktober 2003 yang berbunyi:

*“Maritime issues and concerns are transboundary in nature, and therefore shall be addressed regionally in holistic, integrated and comprehensive manner. Maritime cooperation between and among ASEAN member countries shall contribute to the evolution of the ASEAN Security Community”* (ASEAN, 2012).

### **Persepsi Negara Anggota ASEAN Terhadap Ancaman Keamanan Maritim**

Masalah tindak kejahatan di laut merupakan tema pembahasan internasional, karena prakteknya yang lintas negara (*transnational crimes*). Dalang tindak kejahatan tersebut tertata dengan sangat rapih melibatkan beberapa kelompok dari beberapa negara. Hingga saat ini, jalur perdagangan strategis dunia ialah laut, sekitar 90% perdagangan internasional dipindahkan melalui laut.

Dampak ancaman keamanan maritim tidak hanya pada satu negara melainkan menyebabkan ancaman pada keamanan regional atau kawasan maupun global yang berpotensi mengganggu pola perdagangan di dunia. Dalam catatan ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime* terdapat beberapa jenis tindak kejahatan lintas negara di laut yang sering terjadi di

perairan Asia Tenggara, yakni: pembajakan, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, penyelundupan senjata dan tindak terorisme maritim (Bergqvist, 2015). Ancaman keamanan maritim tersebut merupakan ancaman non-tradisional yang membahayakan bagi kawasan dan tidak dapat ditangani oleh satu negara mengingat wilayah operasi kejahatan tersebut bersifat lintas negara.

Dalam memandang ancaman keamanan maritim, beberapa negara di Asia Tenggara memiliki pandangan yang berbeda. Sudut pandang ancaman negara menentukan pihak aparat yang berwajib dalam menyelesaikan ancaman tersebut. Persepsi ancaman keamanan maritim berkaitan dengan kepentingan nasional setiap negara. Ada yang memandang isu keamanan maritim dengan serius dan *concern* dalam menyelesaikan ancaman tersebut. Untuk memahami persepsi ancaman yang digunakan oleh Negara anggota ASEAN Dapat dilihat dari tabel berikut:

**Table 1 Badan Penanganan Ancaman Keamanan  
Maritim Negara Anggota ASEAN**

Negara	Ancaman Tradisional	Ancaman Non-Tradisional
Indonesia	Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia	Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau Indonesia <i>Coast Guard</i>
Malaysia	Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM)	Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)
Vietnam	<i>People's Navy of Vietnam (PNV)</i>	<i>Vietnam Coast Guard</i>
Filipina	<i>Philippine Navy</i>	<i>Philippine Coast Guard (PCG)</i>
Singapura	<i>Republic of Singapore Navy</i>	<i>Police Coast Guard Singapore</i>
Brunei Darussalam	<i>Royal Brunei Navy (RBN)</i>	<i>Royal Brunei Navy (RBN)</i>
Kamboja	<i>Royal Cambodia Navy (RCN)</i>	<i>Royal Cambodia Navy (RCN)</i>
Thailand	<i>Royal Thai Navy (RTN)</i>	<i>Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center (Thai MECC)</i>
Myanmar	<i>Myanmar Navy</i>	<i>Myanmar Navy</i>
Laos	<i>Lao People's Navy</i>	<i>Lao People's Navy</i>

### **Peran ASEAN sebagai Arena dalam Isu Keamanan Maritim**

Peranan ASEAN sebagai arena dalam isu keamanan maritim terlihat dengan pembentukan forum internasional dan mekanisme kerja yang dikhususkan untuk membahas ancaman keamanan maritim. Hal tersebut menjadi ajang untuk menunjukkan pandangan terhadap ancaman keamanan maritime yang didukung dengan diplomasi efektif oleh negara anggota. Terkadang hal itu digunakan untuk membahas masalah internal negara anggota agar menarik perhatian internasional.

Pada dasarnya, kerjasama politik dan keamanan ASEAN di bidang maritim memiliki tujuan untuk memperkuat keamanan maritim kawasan agar mampu

mendorong kesejahteraan masyarakat ASEAN dan proses pembangunan ekonomi yang signifikan. Kerjasama dalam bidang keamanan maritim ini juga bertujuan untuk memperkuat rasa saling percaya antarnegara ASEAN. Tidak dapat dipungkiri, walaupun ASEAN sudah terbentuk lama, namun ada sedikit celah yang menyebabkan rasa saling percaya tersebut berkurang. Oleh karena itu, semakin meningkatnya rasa percaya tersebut diharapkan akan membuat negara anggota ASEAN semakin solid untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional, khususnya di bidang maritim.

ASEAN sedang dalam proses pembentukan *ASEAN Coast Guard and Maritime Law Enforcement Agencies Forum* yang bertujuan pada penguatan kerja sama dalam menangani tantangan maritim, khususnya menghadapi tantangan keamanan maritim non-tradisional, kejahatan maritim transnasional, keselamatan maritim, dan isu lingkungan laut. *ASEAN Coast Guard Forum and Maritime Law Enforcement Agencies* juga akan memiliki peranan penting sebagai *first responder* di garda terdepan dalam menghadapi pelanggaran maritim di teritorial negara anggota ASEAN, sehingga diperlukan pemahaman bersama mengenai *sharing information, capacity building*, dan koordinasi yang harmonis antar badan penjaga pantai di beberapa negara anggota ASEAN (Wisada,

2020).

Beberapa badan kerjasama ASEAN yang membahas isu keamanan maritim akan dipaparkan dalam tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2 Badan Kerja Sama ASEAN yang Membahas Isu Keamanan Maritim**

Badan Kerja Sama	Agenda
ASEAN Maritime Forum (AMF)	1. <i>Safety of navigation</i> 2. <i>Search and rescue</i> 3. <i>Information sharing</i> 4. <i>Exchange of visits of authorities</i>
Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)	Pertemuan Expanded AMF mengambil bentuk forum track 1,5 dan mengikutsertakan negara-negara di kawasan Asia Timur dengan tetap menjaga sentralitas ASEAN
ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM)	Membahas aspek-aspek yang terkait maritim, khususnya pengelolaan Laut Cina Selatan
ASEAN Regional Forum (ARF)	Kerja sama ARF pada isu-isu non-tradisional, seperti <i>piracy, terrorism, natural disasters, climate change, smuggling of drugs, people and goods</i> serta <i>search and rescue</i> , dipercaya bermanfaat dalam menumbuhkan <i>mutual trust</i> di antara peserta ARF
ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM),	Mempromosikan kerja sama keamanan maritim
ADMM plus	Melalui mekanisme <i>Experts Working Group on Maritime Security</i> (ADMM-Plus EWG on Marsec) yang fokus pada <i>practical maritime security cooperation</i>
ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)	Upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, ASEAN telah memiliki Rencana Aksi untuk Memberantas Kejahatan Lintas Negara ( <i>Plan of Action to Combat Transnational Crime</i> ), 1. <i>Counter terrorism</i> 2. <i>Illicit drugs trafficking</i> 3. <i>Trafficking in persons</i> , 4. <i>Money laundering</i> 5. <i>Arms smuggling</i> 6. <i>Sea piracy</i> 7. <i>International economic crime</i> 8. <i>Cybercrime</i>

**Peran ASEAN Sebagai Instrumen**

Peranan ASEAN sebagai instrumen merupakan fungsi atau manfaat ASEAN bagi negara anggota untuk mencapai suatu tujuan politik luar negerinya. Dapat dikatakan bahwa dalam strategi untuk

mencapai kepentingan nasional, menjadikan ASEAN sebagai alat atau instrumen dalam pencapaian kepentingan nasional tersebut. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ASEAN merupakan bukti bahwa negara anggota ASEAN memiliki *national interest* yang berhubungan dengan ASEAN sehingga tercipta kesepakatan multilateral untuk membangun ASEAN.

Perairan Asia Tenggara adalah rute perdagangan maritim dengan tingkat kepadatan aktivitas yang sangat tinggi. Hal tersebut menyorot pentingnya pengaturan politik dan keamanan di kawasan. Kepentingan maritim di kawasan Asia Tenggara sangat dirasakan negara di dalam kawasan tersebut, bahkan sangat penting bagi negara luar kawasan dengan peran laut sebagai rute transisi kapal niaga atau sebagai bagian dari geostrategi dan geopolitik. Konsekuensi dari pentingnya laut tersebut adalah memunculkan pelaku kejahatan transnasional dan kelompok pembajak (*piracy*) yang beroperasi di wilayah maritim kawasan Asia Tenggara.

Dalam pengamanan sektor maritim kawasan Asia Tenggara, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN menjadi aktor yang menginisiasi mekanisme khusus untuk sama-sama membicarakan dan memperhatikan lebih serius terkait ancaman maritim. Akhirnya, terbentuk forum khusus dialog maritim dengan nama ASEAN

Maritime Forum. Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sangat perhatian terhadap isu keamanan maritim. Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan rute transportasi laut internasional. Wilayah perairan Indonesia juga berhadapan dengan Laut Tiongkok Selatan secara langsung serta menjadi tempat pertemuan empat SLoC. Wilayah Indonesia semakin strategis dengan adanya enam *choke points* yang mengitarinya, yaitu Selat Lombok, Selat Malaka, Selat Ombai, Selat Singapura, Selat Sunda dan Selat Wetar yang digunakan untuk navigasi internasional. Wilayah perairan Indonesia juga sangat kaya dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Bahkan, sepertiga dari gas dunia berada di seputar Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan yang menjadi rute laut terpendek untuk mencapai Teluk Persia dan Afrika (Ramadhani, 2015).

Pemerintahan Joko Widodo, yang dimulai sejak tahun 2014 mengeluarkan Visi Poros Maritim Dunia. Visi ini mengusung lima kebijakan, yang meliputi diplomasi maritim untuk menyelesaikan sengketa batas laut, pengamanan kedaulatan dan keamanan maritim, pengamanan sumber daya alam, intensitas diplomasi pertahanan, dan pengurangan pertikaian maritim antarnegara melalui resolusi sengketa wilayah regional

(Ramadhani, 2015). Untuk mendukung pencapaian visi tersebut dan meningkatkan kehadiran diplomatik Indonesia dalam penyelesaian sengketa maritim, pemerintah mengambil beberapa tindakan. Adapun tindakan-tindakan tersebut, yaitu (i) konsolidasi pemimpin negara-negara anggota ASEAN; (ii) peningkatan sentralitas dan kerja sama regional; (iii) pembangunan arsitektur keamanan regional yang kohesif untuk mencegah kemunculan kekuatan yang lebih besar; (iv) pendalaman dan pengembangan kerja sama bilateral strategis; (v) pengelolaan dampak integrasi ekonomi regional dan perdagangan bebas; dan (vi) promosi kerja sama maritim yang komprehensif dalam kerangka kerja IORA (Gindarsah & Priamarizki, 2014).

Selain Indonesia, Filipina merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara. Filipina mempunyai 7.107 pulau, yang seribu di antaranya tidak berpenghuni. Filipina juga menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Garis pantai Filipina sepanjang 10.850 mil atau dua kali lebih panjang dari pada wilayah kontinental AS (Castro, 2015). Berbeda dengan Indonesia yang tidak terlibat atau berada posisi netral dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, Filipina berseteru dengan Tiongkok terkait klaim atas ZEE-nya. Namun, keputusan arbitrase internasional yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2016

menyatakan bahwa kedaulatan ZEE berada di tangan Filipina.

Pada dasarnya, Filipina mempunyai kepentingan yang hampir sama dengan Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, secara lebih jelas, kepentingan Filipina dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahnya dalam upaya pengamanan wilayah maritim. Adapun tujuan tersebut, antara lain: (1) mempromosikan dan meningkatkan keamanan maritim sebagai komponen utama keamanan nasional; (2) menyediakan lingkungan sosial-politik dan administratif yang stabil dan aman yang dapat mendorong pertumbuhan industri maritim; (3) melindungi dan mempertahankan integritas sumber daya maritim; dan (4) memperkuat postur keamanan maritim dengan berpegang pada Hukum Dasar dan memperluas perencanaan pertahanan eksternal (Pilipinas, 2011). Kepentingan keamanan maritim Filipina semakin besar dengan adanya keputusan Arbitrase Internasional terhadap kepemilikan Laut Filipina Barat. Arbitrase internasional menyimpulkan bahwa Cina tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengklaim wilayah tersebut.

Selanjutnya, Malaysia yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik dalam bidang maritim. Pada tataran politik, Malaysia merupakan salah satu *claimant states* dalam sengketa Laut Cina Selatan.

Dalam sikapnya sebagai negara pengklaim, Malaysia mempunyai kepentingan ekonomi yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi Malaysia berkaitan erat dengan wilayah ZEE. Hal ini terjadi karena hasil eksplorasi dan eksploitasi wilayah ZEE, seperti minyak dan gas, yang bernilai jual tinggi. Bahkan, pendapatan yang diperoleh Malaysia dari industri minyak dan gas mencapai 40% dari total pendapatan nasional (Othman, 2012).

ZEE Malaysia mengandung kekayaan perikanan dan sumber daya hidrokarbon yang melimpah dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Wilayah ini juga menjadi kawasan strategis untuk Malaysia. Strategi maritim dan SLoC Malaysia dibangun dengan ruang lingkup wilayah perairan dan udara yang menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak, Selat Malaka, serta Selat Singapura (Malaysia, 2010).

Negara selanjutnya ialah Brunei Darussalam. Keamanan dan kesejahteraan Brunei Darussalam berpegang pada tiga pilar kebijakan nasional, yaitu kohesivitas dan stabilitas negara; stabilitas lingkungan regional dalam keanggotaan ASEAN; serta pengelolaan kapabilitas pertahanan untuk melindungi kedaulatan, integritas wilayah dan kepentingan, serta menjaga kebebasan dan kemerdekaan (Darussalam, 2004). Brunei Darussalam merupakan salah satu *claimant states* dalam sengketa di Laut Cina

Selatan. Oleh karena itu, pemerintahnya membentuk beberapa kebijakan dan peranan operasional.

Adapun peranan operasional yang diambil oleh pemerintah Brunei Darussalam, yaitu pengawasan dan tanggapan maritim, ancaman di daratan, dan serangan udara; pengawasan *maritime focal areas*; serta pengamanan aset nasional dan infrastruktur tugas nasional (Darussalam, 2004). Peranan-peranan ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama termasuk perluasan ruang patroli dari 200nm untuk menunjukkan kedaulatan, mengatur aktivitas perikanan, dan menyediakan peringatan dini untuk kemungkinan ancaman keamanan. Elemen kedua berupa perluasan wilayah penjagaan hingga 100 nm dari pantai untuk SLoC, melindungi platform minyak dan gas, serta mendeteksi dan menanggapi gerakan transnasional yang signifikan (Darussalam, 2004).

Kemudian kepentingan keamanan maritim bagi Singapura yang melihat perdagangan internasional sebagai urat nadi ekonomi negaranya berpendapat bahwa segala ancaman yang terjadi di perairan, khususnya selat malaka sebagai *existential threat*. Begitupun ancaman dari pihak teroris lintas negara. Masalahnya, negara pantai seperti Singapura sangat bergantung terhadap selat malaka. Sebab setiap tindakan baik bersifat positif ataupun negatif yang

dilakukan dan berhubungan dengan selat malaka akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi dan lebih jauh terhadap eksistensi negara Singapura.

Selain memperhitungkan masalah ancaman terorisme, Singapura juga sangat *concern* pada navigasi di selat Malaka dan selat Singapura. Prediksi tentang kerentanan keselamatan atas serangan teroris merupakan kekhawatiran Singapura, terlebih dengan meningkatnya insiden perompakan dan perampokan bersenjata sepanjang 2015-2019 di selat Malaka. Ancaman terorisme maritim dianggap akan sangat mempengaruhi ekonomi karena gangguanya terhadap lalu lintas kapal. Oleh karena itu, isu fundamental bagi Singapura adalah keselamatan transportasi di selat Malaka, sehingga semua dimensi tersebut harus mencakup isu keamanan juga sebagai bagian integral pembangunan kepentingan keamanan maritim Singapura.

Adapun negara Vietnam yang semakin tersentak oleh klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan. Vietnam memiliki tiga sisi yang berbatasan dengan laut yaitu bagian timur, selatan dan barat daya. Vietnam pun memiliki garis pantai sepanjang 3.260 Km, perairan pedalaman, laut teritorial dan zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Jumlah pulau yang dimiliki Vietnam sekitar 3000 pulau dan kepulauan

besar diantaranya ialah kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly) (Van, 2014). Oleh karena itu, keamanan maritim memainkan peranan penting istimewa bagi Vietnam tentang sosial-ekonomi, pertahanan, keamanan dan lingkungan hdiup.

Berbicara tentang kepentingan keamanan maritim yang dimiliki Vietnam sudah terlihat sejak Negara itu berdiri. Karena kebijakan keamanan maritim Vietnam sudah disusun oleh majelis nasional dan pemerintah, yang keseluruhan strategi membahas tentang membela negara. Khususnya, pada kongres nasional ke-11 kebijakan tentang ideologi-ideologi, faktor strategis tentang penjaminan keamanan di wilayah laut dan kepulauan Vietnam disusun secara sempurna dan disesuaikan dengan situasi terbaru. Pada kongres tersebut masalah-masalah kongkrit dalam konektivitas ekonomi dengan penjaminan keamanan di wilayah laut dan pulau Vietnam sangat ditekankan. Berikut sangat terlihat bahwa kepentingan keamanan maritim Vietnam sangat tinggi dan perhatian pemerintah Vietnam dalam isu keamanan maritim sangat jelas.

Dari berbagai ulasan kepentingan maritime negara anggota ASEAN, merupakan hal yang wajar bila langkah selanjutnya ialah melakukan koordinasi terkait maritime di antara mereka maupun

dengan negara mitra agar dapat menjamin berlangsungnya aktivitas perekonomian. Berhubungan dengan hal tersebut, Indonesia adalah negara yang paling ambisius dan mendukung pembentukan mekanisme kerja sama di bidang keamanan maritim. Hal ini terlihat dari agenda yang diangkat ketika Indonesia menjadi tuan rumah dalam berbagai acara pertemuan, selalu terdapat pembahasan terkait keamanan maritim regional.

Dari berbagai muatan yang berlandaskan kepentingan nasional tiap negara anggota ASEAN terhadap keamanan maritim, dapat dikatakan kebutuhan akan keberlangsungan aktivitas laut yang aman dan stabil sangat menjadi patokan untuk perekonomian internal masing-masing negara di Asia Tenggara. Ditambah kawasan perairan Asia Tenggara yang menjadi jalur lalu lintas internasional dan menjadi *hub* untuk mencapai belahan dunia lain. Sehingga pola kebutuhan dan kepentingan nasional masing-masing negara anggota ASEAN terbentuk dan mencapai suatu persetujuan untuk membangun kerja sama di bidang keamanan maritim. Tingkat kebutuhan terhadap keamanan kolektif semakin meninggi.

Begitupun ASEAN mencoba memfasilitasi kepentingan anggotanya dengan menciptakan berbagai mekanisme kerja khusus di bidang maritim. Bahkan

dalam operasional ASEAN Maritime Forum pemilihan tema utama dalam forum khusus diskusi terkait isu maritim tersebut ditentukan oleh negara tuan rumah, yang mana setiap negara anggota akan terpilih secara bergantian untuk menjadi tuan rumah. Atas dasar itu maka peranan ASEAN sebagai instrumen dalam tercapainya kepentingan negara anggotanya sudah tercapai dan diterapkan seiring berjalanya organisasi internasional regional tersebut.

### **Peran ASEAN Sebagai Aktor Independen**

Peranan ASEAN sebagai aktor independen mencakup berbagai kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan ASEAN tanpa dipengaruhi oleh paksaan atau tekanan dari berbagai pihak baik itu dari luar maupun dalam organisasi. Sebagai aktor, ASEAN mampu melakukan interaksi dengan aktor lain di forum resmi internasional. Secara signifikan, peranan ASEAN sebagai aktor ditentukan melalui keaktifan dalam forum internasional dengan memberikan berbagai resolusi dan rekomendasi. Hal ini berpengaruh terhadap eksistensi ASEAN sebagai aktor independen.

Dalam isu keamanan maritim peranan ASEAN sebagai aktor independen dapat dilihat dari cara ASEAN memainkan perannya dalam konflik laut Tiongkok selatan yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN dan Tiongkok, serta

bagaimana pengambilan langkah atau keputusan dalam isu keamanan maritim tradisional tersebut dengan tanpa adanya tekanan dari pihak luar.

Dalam serangkaian program kerja ASEAN terdapat mekanisme khusus untuk menangani konflik ataupun sengketa yang terjadi di kawasan. Hal ini merupakan refleksi dari ASEAN *Community*. Dalam ASEAN *Community* terdapat ruang tentang keamanan dan politik yang bernama ASEAN *Political Security Community* (APSC). APSC merupakan dasar aturan untuk berperilaku bagi negara anggota dan mitra dalam dimensi keamanan dan politik. Terkait dengan isu keamanan maritim, merupakan bidang APSC untuk menjadi regulasi dalam proses penanggulangan ancaman yang ditimbulkan. ASEAN Regional Forum (ARF) dibentuk dengan regulasi yang dikeluarkan APSC.

Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) dialog antarnegara konflik pada persengketaan laut Tiongkok Selatan terjadi. Hal ini dilakukan untuk meredam konflik secara langsung. Pada pertemuan ARF ke-2 di Brunei Darussalam tahun 1995, terdapat 3 mekanisme yang dapat digunakan dalam upaya penyelesaian konflik, yakni *Conflict Resolution* (CR), *Confidence Building Measures* (CBM) dan *Preventive Diplomacy* (PD).

Dalam upaya menyelesaikan

sengketa, *Confidence Building Measures* (CBM) merupakan bagaimana hubungan antar pihak yang berkonflik dalam mengurangi intensitas ketegangan dan berupaya menciptakan sebuah kesepakatan atau perjanjian yang lebih inklusif. Selanjutnya dalam *Preventive Diplomacy* membahas serangkaian langkah bersama yang diambil agar mampu mencegah konflik, langkah-langkah tersebut terdiri dari berbagai aksi di bidang ekonomi, kemanusiaan, militer, politik dan diplomasi. Terakhir, *Conflict Resolution* adalah mekanisme terakhir ketika kedua mekanisme sebelumnya sudah dilaksanakan.

Implementasi mekanisme *Confidence Building Measures* dan *Preventive Diplomacy* berhasil dilakukan ASEAN dengan fakta hadirnya Tiongkok dalam ARF untuk melakukan negosiasi dan musyawarah, kehadiran Tiongkok tersebut mengurangi intensitas ketegangan di kawasan konflik. Pada awalnya, Tiongkok tidak bersedia melakukan perundingan secara multilateral dan hanya ingin melakukan perundingan secara bilateral. Hasilnya, setelah melewati negosiasi dan perundingan secara multilateral *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* resmi ditandatangani oleh Tiongkok dan negara anggota ASEAN pada tahun 2002 di Kamboja.

Kemudian, pada tahun 2003

diadakan penandatanganan perjanjian TAC dan Tiongkok pun tergabung di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok memiliki prinsip mengutamakan kerja sama daripada konflik global. Terbentuknya dua perjanjian tersebut adalah kesuksesan mekanisme *Confidence Building Measures* dan *Preventive Diplomacy* yang dilakukan ASEAN sehingga dapat menekan peluang konflik militer di Laut Tiongkok Selatan terjadi.

Dalam upaya ASEAN memainkan peranan sebagai aktor independen pada konflik Laut Tiongkok Selatan, diharapkan dapat dikembangkan melalui beberapa *sectoral bodies* seperti AMF dan EAMF, walaupun belum dapat terlihat ketegasan sikap ASEAN. Apabila ASEAN tidak segera bertindak dan berhasil menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan, dikhawatirkan eksistensi dari organisasi internasional regional tersebut menurun. Seharusnya desakkan dari beberapa pihak yang terkait tidak dapat mempengaruhi keputusan ASEAN sehingga integritas ASEAN tetap terjaga.

### **Kesimpulan**

Peran ASEAN di kawasan Asia Tenggara berpengaruh terhadap kondisi keamanan maritime kawasan, karena dengan adanya forum-forum internasional untuk melakukan dialog khusus terkait isu

keamanan maritime merupakan upaya pendataan ancaman keamanan maritime yang terjadi di kawasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ASEAN melakukan pantauan terhadap konflik yang terjadi pada tiap negara anggota dan mencoba mengangkat konflik-konflik tersebut di kanca internasional untuk menarik perhatian dunia internasional agar dapat segera terselesaikan. Karena ASEAN berpendapat bahwa keamanan maritim di kawasan Asia tenggara akan berpengaruh terhadap dunia pelayaran internasional karena jalur perairan Asia tenggara merupakan salah satu jalur penting dalam berjalanya aktivitas ekonomi dunia.

Peran ASEAN sebagai arena pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan ASEAN dalam menjaga keamanan regional. Dalam isu keamanan maritim, ASEAN menciptakan forum internasional sebagai wujud nyata dalam menciptakan wadah untuk negara anggotanya dan mitra. Melalui forum tersebut ASEAN juga menuntaskan perannya sebagai instrumen dan aktor independen.

Peran ASEAN sebagai aktor independen cukup optimal. Dala sengketa Laut Tiongkok Selatan misalnya, ASEAN melalui ARF mampu melakukan dialog secara komprehensif dengan Tiongkok dan berhasil membentuk perjanjian *Declaration*

*on the Conduct of Parties in the South Cina Sea* dan TAC di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut merupakan pencapaian ASEAN sehingga konflik militer yang dikhawatirkan terjadi di laut Tiongkok selatan tersebut dapat dicegah.

## **Referensi**

### **Buku**

- Castro, R. C. (2015). *International Dimensions of National (In) Security Concepts, Challenges and Ways Forward*. 4.
- Hennida, C. (2015). *Rezim dan Organisasi Internasional*. Malang: Intrans Publishing.
- M.Sabir. (1992). *ASEAN harapan dan kenyataan*. Jakarta: pustaka sinar harapan.

### **Jurnal dan Online Jurnal**

- Bergqvist, L. H. (2015, Juli 15). *The ISPS-Code and Maritime Terrorism*. From Center of International Maritim Security: <http://cimsec.org/isps-code-maritime-terrorism/12098>.
- Giok, K. K. (2015). *Sea Power as a Strategic Domain*. *Journal of the Singapore Armed Forces* 41, no. 3, 2-3.
- Keliat, M. (2009). *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*.
- Ramadhani, M. A. (2015). *An Indonesian Perspective toward Maritime Vision: Is Pursuing National Interest while*

- Maintaining Neutrality in the South China Sea Possible? *European Scientific Journal*, 389-390.
- Solidum, E. D. (2003). *The Politics of ASEAN: An Introduction to Southeast Asia Regionalism*. Pennsylvania: eastern university press.
- Publikasi Resmi, Laporan, dan Sumber Online**
- ASEAN. (1976, Februari 24). From Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: <http://asean.org/treaty-amity-cooperationsoutheast-asia-indonesia-24-february-1976/>.
- ASEAN. (2012, Mei 11). From Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II):[https://asean.org/?static\\_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii](https://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii).
- ASEAN. (2015). Fisheries. From Invest in ASEAN:<http://investasean.asean.org/index.php/page/view/fisheries>.
- Brandon, J. J. (2015, januari 7). Southeast Asia in 2015: Maritime Security, myanmar Election. From Asiafoundation.org:<http://asiafoundation.org/2015/01/07/southeast-asia-in-2015-maritimesecurity-myanmar-elections-tpp-top-agenda/>.
- Darussalam, M. o. (2004). Brunei Darussalam Defence White Paper. Bandar Seri Begawan: Ministry of Defence of Brunei Darussalam.
- Diplomasi, T. (2010, September 15). *Tabloid Diplomasi*. From *Tabloid Diplomasi* Website:<http://www.tabloiddiplomasi.org/isu-keamanan-maritim-regional/>.
- IMB, I. (2018, 1 30). Piracy and Armed Robbery Against Ships. London: ICC International Maritime Bureau. From <https://maritimecyprus.files.wordpress.com/2019/01/2018-annual-imb-piracy-report.pdf>.
- Malaysia, M. o. (2010). Malaysia's National Defence Policy. Kuala Lumpur: Ministry of Defence of Malaysia.
- Pilipinas, R. N. (2011). National Security Policy 2011—2016: Security the Gains of Democracy. *Tabloid Diplomasi*. (2010, August 21). *Tabloid Diplomasi*. From *Tabloid Diplomasi* Web Site: <http://www.tabloiddiplomasi.org/konsep-pembentukan-asean-maritime-forum/>.
- Van, H. (2014). Keamanan maritim Vietnam: sesuai dengan hukum internasional, mengarah ke perdamaian. Hanoi: vov international.
- Wibowo, T. (2010, Agustus 21). about us:

Tabloid Diplomasi. From Direktorat  
Diplomasi Publik, Kementrian Luar  
Negeri RI:  
<http://www.tabloiddiplomasi.org/>.

Wisada, A. (2020, Januari 20). Peran  
ASEAN dalam isu keamanan  
maritim di Asia Tenggara. (M.  
Ridho, Interviewer).